IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN ACEH SELATAN PROVINSI ACEH

Ahmad Hidayat
NPP. 33.0002
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: amdhdyat@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ahmad Averus, S.STP., M.Si
Email: ahmadaveus@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem/Background: *South Aceh Regency is one of the flood-prone areas in Aceh Province, causing significant material, social, and environmental losses. Although the local government has established disaster mitigation policies, their implementation still faces challenges, including limited budgets, suboptimal cross-sector coordination, uneven human resource capacity, and varying levels of community participation. These challenges create a gap between policy formulation and field practice.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of flood mitigation policies in South Aceh, identify supporting and inhibiting factors, and evaluate the local government's efforts to enhance policy effectiveness.* ***Methods:*** *A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through in-depth interviews, field observations, and policy document reviews. Data analysis used triangulation and policy implementation dimensions, including temporal, variation sectoral, policy mix coherence, and multilevel governance.* ***Results/Findings:*** *The findings indicate that successful policy implementation is influenced by strong institutional frameworks, effective cross-sector coordination, clear regulatory support, human resource capacity, and community participation. Barriers include limited budgets and infrastructure, suboptimal coordination, low community awareness, and insufficient data management. The local government has undertaken efforts such as strengthening planning, infrastructure development, cross-level coordination, community empowerment, and human resource capacity building.* ***Conclusion:*** *Flood mitigation policy implementation in South Aceh operates adaptively but requires further enhancement in coordination, resource allocation, and community engagement to improve effectiveness and sustainability.*

Keywords: *Flood Mitigation, Policy Implementation, South Aceh*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu wilayah rawan banjir di Provinsi Aceh, yang berdampak pada kerugian material, sosial, dan lingkungan. Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, kapasitas SDM yang belum merata, serta partisipasi masyarakat yang bervariasi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara perumusan kebijakan dan praktik di lapangan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengevaluasi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan menggunakan triangulasi sumber dan dimensi implementasi kebijakan, termasuk temporal, *variation sectoral*, *policy mix coherence*, dan *multilevel governance*. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kelembagaan yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, dukungan regulasi yang jelas, kapasitas SDM, serta partisipasi masyarakat. Hambatan muncul dari keterbatasan anggaran, sarana prasarana, koordinasi yang belum

optimal, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan pengelolaan data. Pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, termasuk penguatan perencanaan, pembangunan infrastruktur, koordinasi lintas level pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas SDM. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Aceh Selatan berjalan adaptif, namun masih perlu penguatan koordinasi, sumber daya, dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan.

Kata Kunci: Aceh Selatan, Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Banjir

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam, khususnya bencana hidrometeorologi seperti banjir. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2024), terdapat sebanyak 1.255 kejadian bencana banjir selama tahun 2023. Banjir menjadi jenis bencana yang paling dominan dengan proporsi lebih dari 35% dari seluruh bencana yang dilaporkan. Tingginya intensitas curah hujan, kerusakan lingkungan, serta kurangnya sistem drainase yang memadai menjadi penyebab utama banjir yang berulang di berbagai wilayah (Pratiwi, 2024).

Indonesia sering mengalami banjir karena letaknya sebagai negara kepulauan dengan banyak sungai dan dataran rendah. Hujan deras, perubahan penggunaan lahan, dan sistem drainase yang kurang baik meningkatkan frekuensi dan dampak banjir setiap tahun. Dalam lima tahun terakhir, banyak kejadian banjir yang mempengaruhi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Selain kerusakan infrastruktur dan rumah, banjir juga menyebabkan hilangnya nyawa. Kondisi tersebut sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Jumlah Kejadian Dan Korban Meninggal Akibat Banjir di Indonesia 2019 - 2024



Sumber: *Diolah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2024) dan Badan Pusat Statistik (2024)*

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan insiden banjir dan jumlah korban meninggal dari tahun 2019 hingga 2024. Frekuensi banjir bervariasi tetapi cenderung menurun dari 2021 hingga 2024, dengan puncak 1. 794 kasus di 2021 yang turun menjadi 1. 109 kasus di 2024. Namun, jumlah orang yang meninggal tidak mengalami penurunan yang sama. Korban jiwa melonjak pada 2021 dan meningkat lagi pada 2024, mencapai 351 jiwa. Ini menunjukkan bahwa meskipun frekuensi banjir menurun, dampak dan keparahannya meningkat. Penyebab bisa jadi karena kepadatan penduduk di daerah banjir, infrastruktur yang lemah, atau kurangnya persiapan mitigasi bencana.

Di lingkup daerah, terdapat beberapa provinsi yang mengalami fluktuasi jumlah kasus banjir selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024. Data menunjukkan bahwa sejumlah provinsi mencatatkan peningkatan signifikan dalam angka temuan kasus, sementara beberapa lainnya

mengalami penurunan yang cukup berarti. Persentase peningkatan dan penurunan angka temuan kasus banjir tertinggi, telah dirangkum dan tersaji secara rinci pada Tabel 1.1

Tabel 1.1. Jumlah Temuan Kasus Banjir Di 10 Provinsi Terbanyak di Indonesia

NO	Provinsi	Jumlah Temuan Kasus Banjir Di 10 Provinsi Dengan Persentase kenaikan Tertinggi Di Indonesia (Kasus)				Total
		2021	2022	2023	2024	
1	Jawa Barat	145	130	120	145	**540**
2	Sumatera Utara	110	105	95	101	**411**
3	Jawa Timur	95	90	88	98	**371**
4	Jawa Tengah	90	85	80	91	**346**
5	Riau	80	75	70	89	**314**
6	Sulawesi Selatan	85	80	75	70	**310**
7	Aceh	60	58	55	68	**241**
8	Sumatera Selatan	55	50	48	55	**208**
9	Sulawesi Tengah	52	49	47	50	**198**
10	Nusa Tenggara Barat	48	45	42	40	**175**

Sumber: *Diolah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2024) dan Badan Pusat Statistik (2024)*

Berdasarkan data dari kasus banjir pada 10 provinsi tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya penurunan kasus banjir yang cukup signifikan tiap tahunnya. sebaliknya,terjadinya peningkatan kasus banjir walaupun tidak terlalu drastis. Pola peningkatan ini mengindikasikan adanya tekanan antropogenik yang semakin intensif akibat urbanisasi pesat, alih fungsi lahan, dan degradasi sistem drainase alami, yang diperburuk oleh fenomena perubahan iklim global yang meningkatkan intensitas dan frekuensi curah hujan ekstrem (Capano & Howlett, 2020).

Provinsi Aceh dipilih sebagai lokasi penelitian meskipun jumlah kasus banjirnya tidak sebesar provinsi lain karena memiliki karakteristik geografis, sosial, dan politik yang unik, termasuk status otonomi khusus. Selain itu, tren kenaikan kasus banjir di Aceh dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan signifikan yang penting untuk dianalisis. Data terdekat ditemukan pada laporan DLHK Aceh (2020) yang menyatakan deforestasi Aceh rata-rata 20.000 hektare per tahun (2013-2019) disebabkan *illegal logging*, perambahan untuk budidaya ilegal, dan pertambangan liar terutama di Aceh Timur, Utara, dan Tamiang. Sumber lain seperti HAkA mencatat 21.000 ha pada 2015 dan 8.906 ha pada 2023 untuk Aceh secara keseluruhan, sementara Aceh Selatan spesifik 1.704 ha (2022) akibat perambahan di Trumon dan Rawa Singkil (Mukhtari & Fitri, 2025).

Penelitian di Aceh diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terkait implementasi kebijakan pengelolaan bencana pada konteks daerah dengan kondisi berbeda dibanding provinsi lain yang lebih sering diteliti. Dengan demikian, fokus pada Aceh bukan hanya berdasarkan jumlah kasus, tetapi juga mempertimbangkan relevansi akademis dan praktis dari konteks lokal yang spesifik..

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), pada tahun 2024 saja Provinsi Aceh mengalami 68 kejadian banjir yang mengakibatkan kerusakan pada 5.062 rumah, 11 jembatan, 18 tanggul, serta 883 hektare sawah terendam dengan total kerugian mencapai 123 miliar rupiah. Peningkatan kasus banjir di Aceh mengindikasikan perlunya pendekatan mitigasi yang komprehensif melalui rehabilitasi hutan lindung, perbaikan sistem drainase perkotaan, pengelolaan DAS terpadu, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana untuk mengurangi risiko dan dampak banjir di masa mendatang.

Dilihat dari data banjir di Provinsi Aceh, terdapat sepuluh kabupaten/kota yang mencatatkan jumlah kasus banjir terbanyak dalam lima tahun terakhir. Jumlah kasus banjir di daerah-daerah tersebut menunjukkan variasi tiap tahun, seperti yang bisa dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1.2. Jumlah Temuan Kasus Banjir Di 10 Kabupaten/Kota Terbanyak di Provinsi Aceh

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Temuan Kasus Banjir Di 10 Kabupaten/Kota Terbanyak Di Provinsi Aceh (Kasus)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh Timur	50	48	53	55	60
2	Pidie	40	37	42	45	48
3	Bireuen	35	28	33	37	39
4	Aceh Utara	30	27	32	29	27
5	Langsa	25	20	28	33	31
6	Aceh Selatan	22	25	24	27	26
7	Aceh Barat	20	22	20	21	23
8	Aceh Besar	19	21	22	23	24
9	Aceh Jaya	18	19	20	22	25
10	Aceh Tengah	15	16	17	20	21

Sumber: *Diolah dari BNPB Dan Badan Pusat Statistik,2024*

Berdasarkan tabel 1.2 kasus banjir di Kabupaten Aceh Selatan dari 2020 hingga 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada 2020, terjadi 22 kejadian banjir, meningkat menjadi 25 pada 2021, lalu menurun sedikit menjadi 24 pada 2022. Pada 2023 kasus meningkat lagi menjadi 27, sebelum turun sedikit menjadi 26 pada 2024. Angka-angka ini menunjukkan masalah dalam pengelolaan risiko banjir. Kenaikan pada 2021 dan 2023 mungkin disebabkan oleh cuaca ekstrem dan ancaman banjir bandang. Penurunan di 2022 dan 2024 bisa menunjukkan adanya upaya mitigasi yang mulai efektif, meski risiko masih ada.

Kabupaten Aceh Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian terkait bencana banjir meskipun data frekuensi kejadian banjir di beberapa kabupaten lain lebih tinggi didasari oleh pertimbangan aspek kerentanan, karakteristik wilayah, serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Berdasarkan data, Aceh Timur, Pidie, dan Bireuen memang memiliki jumlah temuan kasus banjir yang lebih tinggi secara absolut selama periode 2020–2024. Namun, Aceh Selatan menunjukkan konsistensi tingginya intensitas kejadian dan kerentanan infrastruktur maupun masyarakat terhadap dampak banjir. Selain itu, jalur lintas nasional yang melewati wilayah ini memiliki peran strategis dalam konektivitas transportasi dan ekonomi antar provinsi, khususnya antara Banda Aceh dan wilayah Sumatera Utara.

Hal ini terlihat jelas ketika luapan Sungai Lae Soeraya merendam ruas jalan nasional, khususnya di kawasan Aceh Selatan, yang mengakibatkan kelumpuhan total pada akses transportasi darat kedua provinsi. Genangan air berskala besar ini tidak hanya menghentikan mobilitas ratusan kendaraan logistik, tetapi juga menimbulkan ancaman kerusakan fisik yang parah pada konstruksi jalan dan jembatan yang menjadi jalur utama penghubung. Putusnya konektivitas ini secara langsung memberikan pukulan berat bagi perputaran ekonomi daerah akibat terhambatnya rantai pasok (supply

chain), terhambatnya distribusi bahan pokok, dan terhentinya aktivitas perdagangan lintas wilayah.(Saputra, 2025)

Secara kumulatif, rentetan bencana banjir di kawasan ini diproyeksikan menimbulkan kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah bagi Aceh dan Sumatera Utara, sehingga menuntut adanya evaluasi komprehensif terkait rancang bangun infrastruktur yang tahan bencana guna memitigasi kerugian ekonomi regional di masa depan Jalur lintas nasional tersebut menjadi akses utama bagi mobilitas barang dan penumpang, sehingga apabila terjadi bencana banjir seperti yang sering terjadi di Aceh Selatan, maka dampaknya sangat signifikan terhadap kelancaran transportasi nasional dan regional.

Bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Selatan selama lima tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Pertama, dari aspek sosial, total jiwa terdampak mencapai lebih dari 30.000 orang, dengan puncak tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 9.532 jiwa terdampak banjir. Meskipun angka korban jiwa relatif rendah hanya satu orang meninggal pada banjir tahun 2015 besarannya populasi terdampak menuntut kebijakan mitigasi dan kesiapsiagaan yang lebih komprehensif untuk menekan kerentanan masyarakat di wilayah rawan banjir(Surry, 2021).

Keberadaan sungai-sungai besar seperti Sungai Kluet, Sungai Manggamat, dan anak-anak sungainya, menjadikan wilayah ini rawan terhadap banjir saat terjadi curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Pola curah hujan yang dipengaruhi iklim tropis basah menjadikan Aceh Selatan hampir setiap tahun menghadapi potensi banjir yang serius.

Tabel 1.3. Distribusi Kejadian Banjir tiap kecamatan dari tahun 2020 – 2025

NO	KECAMATAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Trumon Timur	4	3	3	4	3	3
2	Trumon Tengah	3	2	4	4	3	3
3	Trumon	3	2	4	3	2	2
4	Kluet Tengah	3	2	3	3	2	2
5	Kluet Timur	2	2	3	3	2	1
6	Bakongan Timur	2	1	2	2	1	2
7	Labuhan Haji	2	1	2	2	1	1
8	Kluet Selatan	1	2	2	2	1	1
9	Pasie Raja	1	1	2	2	0	1
10	Bakongan	1	1	2	1	0	2
11	Labuhan Haji Timur	1	1	2	1	0	1
12	Bakongan Barat	1	0	1	1	0	1
13	Kluet Utara	2	2	3	3	2	2
14	Kota Bahagia	1	1	2	2	1	1
15	Labuhan Haji Barat	1	1	2	2	1	1
16	Meukek	2	2	3	3	2	2
17	Samadua	2	2	3	3	2	1
18	Sawang	2	2	3	2	1	1

Sumber: *Diolah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan (2025)*

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa kawasan Trumon harus menjadi prioritas utama dalam implementasi mitigasi struktural seperti normalisasi sungai, pembangunan tanggul, dan sistem drainase. Dengan 42,1% total kejadian terkonsentrasi di kawasan ini, investasi infrastruktur di wilayah Trumon akan memberikan dampak mitigasi maksimal .

kecamatan Trumon Timur, Trumon Tengah, dan Trumon mendominasi frekuensi kejadian banjir dengan total kejadian masing-masing sebesar 20, 19, dan 16 kali dalam kurun waktu enam tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kawasan ini merupakan daerah rawan banjir utama yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan mitigasi bencana. Kemungkinan penyebabnya adalah karakteristik geografis dan hidrologis yang mempermudah terjadinya genangan air dan banjir kiriman dari hulu sungai. Secara keseluruhan, total kejadian banjir di Kabupaten Aceh Selatan selama periode lima tahun mencapai 115 kali, dengan kecamatan Trumon dan sekitarnya menyumbang bagian terbesar. Oleh karena itu, prioritas kebijakan dan sumber daya pada wilayah tersebut perlu dipertimbangkan guna meningkatkan efektivitas mitigasi banjir.

Kejadian banjir pada tanggal 10-11 Agustus 2024 juga menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Selatan. Hujan deras dengan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur wilayah tersebut hampir selama 24 jam penuh menyebabkan meluapnya aliran sungai di sejumlah kecamatan. Intensitas curah hujan yang tinggi memicu peningkatan debit air sungai yang tidak mampu lagi ditampung, sehingga menggenangi pemukiman penduduk (Wijayanto dkk, 2024). Kondisi ini tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik pada rumah dan fasilitas umum, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat, seperti kegiatan perdagangan, pendidikan, dan transportasi (Wijayanto dkk, 2024).

Terdapat 10 kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan yang mengalami dampak banjir terbesar, dengan jumlah desa atau kelurahan yang terkena banjir paling banyak. Kecamatan dengan dampak terparah adalah Kluet Tengah. Kondisi tersebut sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.

Gambar 1.2. Jumlah Desa/Kelurahan Terdampak Banjir Terbanyak Tahun 2024

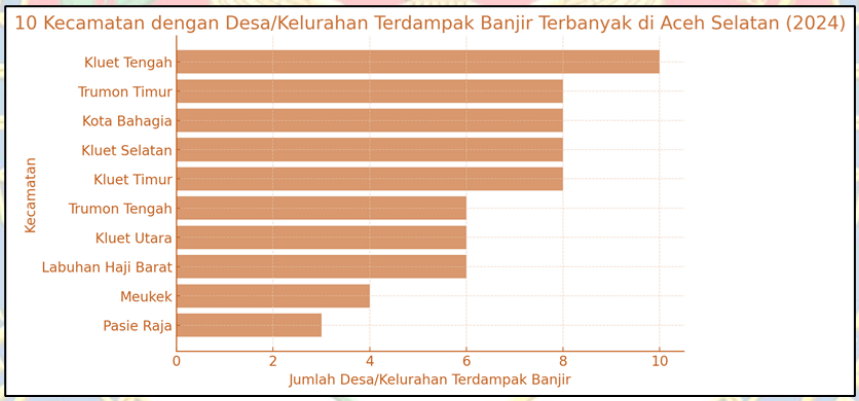

Sumber: *Diolah dari Badan Pusat Statistik, 2024*

Berdasarkan Gambar 1.2, terlihat bahwa Secara umum, kecamatan-kecamatan yang masuk dalam daftar 10 teratas memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap bencana banjir.Penyebabnya meliputi lokasi yang berada di daerah aliran sungai, curah hujan yang tinggi, serta kurangnya infrastruktur untuk mengendalikan banjir. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut perlu mendapat perhatian lebih dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.Oleh karena itu, upaya mengatasi banjir di Kabupaten Aceh Selatan sebaiknya fokus pada kecamatan-kecamatan yang paling terdampak, agar risiko bencana di masa depan dapat dikurangi seminimal mungkin.

Penanggulangan bencana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 24 Tahun 2012. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi. Artinya, pemerintah daerah harus mampu melakukan langkah mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Masalah yang dihadapi dalam penanganan bencana adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan berkualitas di BPBD. Banyak daerah masih kekurangan personel dengan kapasitas dan kapabilitas memadai, sehingga menghambat

efektivitas penanganan bencana. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang belum optimal dan minimnya fasilitas pendukung turut menjadi kendala signifikan. Keterbatasan ini menyebabkan penanganan bencana menjadi kurang cepat dan responsif, sehingga meningkatkan risiko dampak negatif bagi masyarakat terdampak (Sari dkk., 2021).

kondisi ini menegaskan pentingnya implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir. Implementasi bukan hanya sebatas program dilaksanakan, tetapi juga melihat sejauh mana kebijakan tersebut efektif mencapai tujuan, efisien dalam penggunaan sumber daya, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta berkelanjutan untuk jangka panjang.

Dalam praktiknya, penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD semata, tetapi melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Sosial yang memiliki mandat teknis pada aspek infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak

Sejumlah penelitian telah dilakukan terkait penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan, dengan fokus yang beragam mulai dari pemetaan risiko hingga evaluasi kebijakan dan strategi implementasi. Studi yang dilakukan oleh Universitas Syiah Kuala *melalui Tsunami and Disaster Mitigation Research Center* (*TDMRC)* berjudul "Studi Kelayakan Penanganan Banjir Kawasan Trumon Kabupaten Aceh Selatan" mengidentifikasi berbagai faktor penyebab, risiko, dan ancaman banjir serta mengupas upaya penanggulangannya di kawasan Trumon, salah satu wilayah yang paling rawan banjir di Aceh Selatan.

Ada pula riset yang memetakan daerah risiko banjir di DAS Kluet, Kabupaten Aceh Selatan dengan metode indeks risiko banjir, yang merekomendasikan perlunya strategi manajemen bencana dengan pendekatan peta risiko sebagai dasar kebijakan mitigasi. Sementara itu, strategi teknis penyaluran bantuan logistik juga diteliti, dengan hasil bahwa proses penyaluran di Kabupaten Aceh Selatan telah berjalan baik namun perlu optimalisasi dengan analisis SWOT agar distribusi bantuan lebih efektif. Penelitian-penelitian tersebut umumnya merekomendasikan perlunya kolaborasi antar stakeholder, optimalisasi kelembagaan daerah, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mitigasi.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi *contextual gap*, yaitu kekurangan kajian mendalam terhadap implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir secara komprehensif di konteks spesifik Kabupaten Aceh Selatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan penanggulangan banjir dalam konteks lokal yang spesifik, serta memberikan rekomendasi strategis yang lebih aplikatif dan relevan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana banjir di masa mendatang.

Dalam konteks Kabupaten Aceh Selatan, implementasi kebijakan penanggulangan banjir menjadi penting setidaknya karena tiga alasan utama. Pertama, aspek kerentanan geografis: Aceh Selatan berada di wilayah dengan curah hujan tinggi dan aliran sungai besar, sehingga potensi banjir akan terus ada di masa depan. Kedua, aspek kelembagaan: meskipun BPBD sudah aktif, tetapi perlu dikaji apakah kelembagaan dan koordinasi lintas sektor sudah berjalan optimal. Ketiga, aspek sosial-ekonomi: banjir berdampak langsung pada ribuan warga, sehingga kebijakan penanggulangan banjir memiliki implikasi luas terhadap pembangunan daerah.

Penelitian ini relevan karena banjir di Aceh Selatan tidak dapat dipisahkan dari dinamika pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan proses pembangunan yang intensif seringkali berdampak pada perubahan penggunaan lahan dan lingkungan, seperti penggundulan hutan, perubahan tata ruang, serta pembangunan infrastruktur yang belum memperhatikan aspek pengendalian banjir. Selain itu, curah hujan tinggi yang terjadi juga menjadi faktor pemicu banjir, namun dampaknya

semakin parah karena kondisi lingkungan dan infrastruktur belum optimal mengantisipasi bencana tersebut. Infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul, saluran drainase, atau normalisasi sungai belum sepenuhnya memadai. Selain itu, faktor degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan, penebangan hutan, dan lemahnya pengawasan tata ruang turut memperparah kerentanan banjir. Dengan melihat fakta tersebut, maka penelitian ini dibuat dengan judul *"***Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh***"* .

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan telah menjadi perhatian pemerintah daerah selama bertahun-tahun, namun berbagai temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan implementasi di lapangan. Meskipun sudah tersedia regulasi, SOP, dan program mitigasi, kenyataannya penanganan banjir masih menghadapi tantangan serius, seperti keterbatasan anggaran, sarana prasarana, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan. Kondisi ini menyebabkan beberapa program hanya berjalan parsial dan responsif terhadap situasi darurat, bukan berbasis perencanaan strategis jangka panjang.

Selain itu, integrasi antar-instrumen kebijakan (*policy mix coherence*) belum sepenuhnya tercapai, sehingga regulasi, anggaran, SOP, dan program di lapangan tidak selalu sejalan, memengaruhi efektivitas mitigasi dan tanggap darurat. Di sisi lain, kapasitas SDM di tingkat desa atau gampong belum merata, sehingga evakuasi, distribusi bantuan, dan pelaksanaan program pencegahan belum optimal. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh dan pendekatan adaptif yang menggabungkan perencanaan berbasis data, koordinasi lintas level pemerintahan, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk menjembatani ketidaksesuaian antara kebijakan formal dan praktik lapangan, sekaligus memperkuat keberhasilan implementasi penanggulangan banjir di Aceh Selatan.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan memiliki urgensi yang tinggi karena wilayah ini termasuk rawan banjir dengan frekuensi yang cukup sering, menimbulkan kerugian material dan sosial yang signifikan. Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan dan program mitigasi, implementasinya belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan formal dan praktik di lapangan. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat efektivitas penanggulangan banjir secara berkelanjutan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 1.4. Penelitian Terdahulu

No	Nama,Tahun,Judul	Tujuan	Teori	Metode	Hasil Penelitian
1	Rahma dan Yulianti (2020) Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir di	Mengetahui kesiapsiagaan masyarakat terhadap banjir di Gampong Cot Bayu	Teori Kesiapsiagaan Bencana menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006)	Kuantitatif: angket dan skala Guttman	57% masyarakat sudah siap siaga menghadapi banjir

	Gampong Cot Bayu, Trumon Tengah, Aceh Selatan		dan Teori Partisipasi Masyarakat menurut Cohen & Uphoff (1977)		
2	Furqan & Harahap (2024) Evaluasi Program Penyaluran Bantuan Logistik Korban Banjir di Kecamatan Sawang, Aceh Selatan	Mengevaluasi penyaluran bantuan logistik dan faktor pendukung/penghambatnya	Teori Evaluasi CIPP Stufflebeam (1983) dan Teori Manajemen Logistik Bencana menurut Fritz Institute	Kualitatif: wawancara, observasi, dokumentasi (model CIPP)	Program berjalan baik; koordinasi baik namun perlu perbaikan di beberapa aspek administrasi
3	Wetania & Jalaluddin (2023) Strategi Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Logistik Banjir di Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan	Menganalisis strategi Dinas Sosial dalam distribusi bantuan logistik	Teori Strategi Organisasi Chandler (1962) dan Teori Manajemen Krisis Coombs (2007)	Kualitatif: wawancara, observasi, dokumentasi	Lambatnya distribusi akibat medan sulit, SDM dan sarana terbatas
4	Aisyiah & Amin (2024) Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pasca Banjir di Kabupaten Aceh Selatan	Menilai efektivitas kebijakan rehabilitasi pasca-banjir	Teori Implementasi Kebijakan Edward III (1980) dan Teori Rehabilitasi Pasca Bencana (UNDANA, 2019)	Kualitatif: studi kasus, wawancara, dokumentasi	Rehabilitasi berjalan, namun koordinasi dan pendanaan perlu diperkuat
5	Herald dkk (2025) Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus)	Mengidentifikasi faktor keberhasilan dan hambatan implementasi kebijakan penanggulangan bencana	Teori Implementasi Kebijakan Knill & Tosun (2020): kejelasan desain, pengawasan, kelembagaan, sumber daya, instrumen,	Kualitatif: wawancara, observasi, dokumentasi; purposive & snowball sampling	Implementasi efektif; hambatan pada peralatan dan teknologi informasi, dukungan kebijakan dan koordinasi relatif baik

			kemampuan administratif		

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan menghadirkan kebaruan ilmiah yang signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini menyajikan analisis komprehensif mengenai kesenjangan antara perumusan kebijakan formal dan praktik implementasi di lapangan, dengan menekankan dimensi temporal, *variation sectoral*, *policy mix coherence*, *multilevel governance*, dan partisipasi masyarakat. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung menyoroti aspek teknis atau mitigasi fisik, seperti pembangunan tanggul atau normalisasi sungai, tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan faktor kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta peran masyarakat sebagai aktor strategis. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menekankan pentingnya integrasi antara regulasi, program, anggaran, SOP, dan kegiatan masyarakat dalam kerangka *policy mix* yang koheren.

Kedua, penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi data yang menggabungkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan pengungkapan dinamika implementasi yang bersifat kontekstual dan nuansial, termasuk pengaruh hubungan vertikal antarlevel pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, gampong) terhadap efektivitas penanganan banjir. Penggunaan dimensi *multilevel governance* untuk mengevaluasi integrasi kebijakan di berbagai level pemerintahan merupakan kontribusi baru yang memperluas pemahaman terhadap implementasi kebijakan publik di daerah rawan bencana.

Ketiga, penelitian ini menekankan keterkaitan antara faktor teknis, kelembagaan, sosial, dan partisipatif secara simultan, sehingga menghasilkan pemahaman holistik tentang kondisi lapangan. Temuan terkait peran aktif masyarakat dalam mitigasi, pelaporan dini, dan partisipasi dalam evakuasi memberikan bukti empiris mengenai pentingnya *community-based disaster management* dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang sering membatasi analisis pada peran pemerintah atau infrastruktur saja.

Keempat, kebaruan lain dari penelitian ini adalah pemetaan faktor pendukung dan penghambat secara sistematis berdasarkan dimensi implementasi kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kejelasan kelembagaan, koordinasi lintas sektor yang efektif, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana, kualitas SDM, serta kesadaran masyarakat. Sebaliknya, hambatan muncul dari keterbatasan anggaran, sarana prasarana, koordinasi yang belum optimal, rendahnya kesadaran lingkungan, dan keterbatasan data kebencanaan. Analisis faktor ini memberikan kerangka konseptual baru yang dapat dijadikan acuan bagi pengembangan strategi mitigasi bencana di daerah lain dengan karakteristik serupa.

Selain itu, penelitian ini menghadirkan rekomendasi praktis berbasis bukti (*evidence-based recommendations*), termasuk penguatan perencanaan berbasis data, integrasi instrumen kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi lintas level pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan publik yang adaptif dan responsif terhadap kondisi lokal, sekaligus menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat implementasi program penanggulangan bencana secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kebaruan ilmiah melalui kombinasi analisis multidimensi, pendekatan kualitatif deskriptif dengan triangulasi, penguatan *multilevel governance*, integrasi peran masyarakat, serta pemetaan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Kontribusi ini memperluas literatur tentang manajemen bencana, implementasi kebijakan publik, dan strategi mitigasi banjir berbasis konteks lokal di daerah rawan bencana seperti Kabupaten Aceh Selatan.

1.6 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan

II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses, dinamika koordinasi, hambatan, dukungan, serta upaya pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan penanggulangan banjir. Dalam dokumen skripsi, metode yang digunakan juga dijelaskan sebagai kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dianggap memahami pelaksanaan kebijakan, seperti BPBD, dinas terkait, tokoh masyarakat, dan masyarakat terdampak. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, regulasi, laporan BPBD, arsip pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan. Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling, snowball sampling, dan accidental sampling agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian (Pahwa dkk., 2023).

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, dibantu pedoman wawancara dan catatan lapangan. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dkk (2019) melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan

Implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan merupakan proses yang kompleks, melibatkan berbagai indikator yang menjadi tolok ukur efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, indikator implementasi yang digunakan mengacu pada kerangka Capano dan Howlett (2020), meliputi urutan pelaksanaan kebijakan, jalur perubahan instrumen kebijakan, titik kritis, pola penggunaan instrumen lintas sektor, sinergi antar sektor, konsistensi dan koherensi instrumen, kongruensi, hubungan vertikal, struktur koordinasi, serta partisipasi publik. Implementasi ini menekankan bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Selatan menjalankan kebijakan dari tahap perencanaan hingga evaluasi, sekaligus menyesuaikan instrumen kebijakan sesuai konteks lokal untuk mencapai tujuan penanggulangan bencana yang optimal.

Urutan pelaksanaan kebijakan merupakan indikator utama yang menunjukkan tahapan implementasi, dimulai dari penyusunan rencana kerja, pembentukan tim pelaksana, koordinasi lintas sektor, pelaksanaan di lapangan sesuai SOP, hingga monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Kepala Pelaksana BPBD menekankan bahwa setiap program dimulai dengan perencanaan matang, pembagian tugas yang jelas, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan prosedur standar, lalu diakhiri dengan evaluasi untuk perbaikan program berikutnya. Penerapan urutan ini penting agar kegiatan berjalan konsisten, efektif, dan sesuai regulasi. Tahapan yang sistematis ini juga meminimalkan kesalahan operasional serta memastikan akuntabilitas dalam penanganan bencana.

Jalur perubahan instrumen kebijakan merujuk pada penyesuaian atau penggantian instrumen kebijakan, termasuk regulasi, SOP, petunjuk teknis, dan program, agar lebih sesuai dengan kondisi lapangan. BPBD secara berkala mengevaluasi efektivitas instrumen, mengidentifikasi kelemahan, dan melakukan revisi atau penambahan yang masih selaras dengan kebijakan daerah dan peraturan perundang-undangan. Melalui jalur perubahan ini, instrumen kebijakan menjadi lebih adaptif,

relevan, dan mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program penanggulangan bencana dengan lebih efektif.

Titik kritis menjadi fokus ketika terjadi kondisi darurat yang tidak sesuai rencana. Tahap ini mencakup respons cepat terhadap bencana mendadak, keterbatasan sumber daya, perbedaan persepsi antar pemangku kepentingan, atau temuan evaluasi yang menunjukkan ketidakefektifan instrumen. BPBD Aceh Selatan secara aktif menyesuaikan prioritas kegiatan, menambah personel, dan memperkuat koordinasi lintas sektor di titik-titik kritis ini. Hal ini memungkinkan pembelajaran berkelanjutan, penguatan SOP, dan adaptasi strategi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana di masa depan.

Pola penggunaan instrumen lintas sektor menunjukkan integrasi kebijakan, program, mekanisme koordinasi, dan layanan operasional yang dijalankan oleh berbagai perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum. Masing-masing sektor menyesuaikan instrumen sesuai mandatnya, namun tetap mengacu pada tujuan bersama: perlindungan masyarakat dan pemulihan pascabencana. Dinas Sosial, misalnya, menyesuaikan data penerima bantuan, mekanisme distribusi, serta layanan sosial agar sesuai koordinasi BPBD, memastikan bantuan tepat sasaran, adaptif, dan responsif terhadap dinamika situasi bencana.

Sinergi antar sektor menjadi elemen penting, diwujudkan melalui koordinasi sejak tahap perencanaan, latihan kesiapsiagaan, hingga tanggap darurat. Bidang Kesiapsiagaan BPBD menguatkan mekanisme koordinasi, memanfaatkan data bersama, dan menyelaraskan kegiatan antar sektor serta pemerintah gampong. Sinergi ini mengoptimalkan mobilisasi sumber daya, mempercepat respons lapangan, dan mengurangi tumpang tindih peran sehingga penanggulangan bencana dapat berjalan lebih terstruktur dan efektif.

Konsistensi antar instrumen menjamin bahwa regulasi, SOP, rencana kontinjensi, dan mekanisme koordinasi saling mendukung dan tidak kontradiktif. Kepala Pelaksana BPBD menekankan peninjauan berkala dan penyesuaian dokumen teknis agar praktik lapangan tetap selaras dengan aturan normatif. Konsistensi ini memungkinkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan bencana berlangsung sistematis, akuntabel, dan sesuai pedoman hukum.

Koherensi pencapaian tujuan menekankan keselarasan antara sasaran kebijakan dengan implementasi di lapangan. Bidang Damkar dan Penyelamatan BPBD menyesuaikan prioritas evakuasi, alokasi armada dan personel, serta koordinasi lintas unit untuk memastikan setiap tindakan mendukung tujuan utama: perlindungan jiwa, pengurangan risiko, dan pemulihan cepat masyarakat terdampak. Koherensi ini menjamin bahwa setiap langkah operasional benar-benar mengarah pada sasaran kebijakan dan meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana.

Kongruensi merujuk pada keselarasan antara kebijakan tertulis, instrumen yang digunakan, dan praktik lapangan. Bidang Damkar dan Penyelamatan meninjau SOP, menyesuaikan prosedur, dan menyelaraskan pola kerja dengan arahan kebijakan. Kongruensi memastikan bahwa tindakan teknis seperti pemadaman, evakuasi, dan penyelamatan korban merefleksikan prioritas dan tujuan kebijakan, sehingga implementasi kebijakan dapat dilakukan secara harmonis dan terarah.

Hubungan vertikal menunjukkan koordinasi BPBD Aceh Selatan dengan BPBA (provinsi) dan BNPB (pusat) dalam hal regulasi, pendanaan, dan arahan kebijakan. Hubungan ini memungkinkan kebijakan daerah selaras dengan kebijakan nasional (*national policy*), memperoleh dukungan sumber daya, dan menyesuaikan perencanaan lokal. Kepala Pelaksana BPBD menekankan pentingnya *feedback loop*, di mana laporan dan evaluasi dari lapangan dikirim ke tingkat provinsi maupun pusat untuk mendapatkan arahan dan dukungan yang tepat.

Struktur koordinasi mengatur garis komando, pembagian peran, dan mekanisme komunikasi antar pihak terkait. Kepala Pelaksana BPBD menegaskan bahwa setiap bidang memiliki tugas yang jelas, mulai dari kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Koordinasi dengan dinas terkait, camat, dan pemerintah gampong memastikan alur informasi dan instruksi cepat dan tepat. Struktur ini menjadi fondasi agar pengambilan keputusan dan mobilisasi sumber daya berjalan efektif, terutama dalam situasi darurat yang menuntut respons cepat.

Partisipasi publik dan aktor lokal sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. BPBD dan Dinas Sosial melibatkan perangkat gampong, relawan, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan dalam pelatihan, sosialisasi, evakuasi, dan distribusi bantuan. Partisipasi ini meningkatkan kecepatan respons, memperkuat kepemilikan masyarakat atas program mitigasi, dan membangun kesadaran serta kesiapsiagaan warga terhadap risiko bencana. Kepala Dinas Sosial menyatakan bahwa partisipasi publik juga membantu memastikan akurasi data penerima bantuan dan distribusi yang transparan.

Selain indikator-indikator tersebut, implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan memperlihatkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap dinamika lapangan. BPBD secara kontinu menyesuaikan strategi mitigasi, memperbarui SOP, melakukan evaluasi rutin, dan menyesuaikan alokasi sumber daya untuk menghadapi kondisi yang berubah, termasuk banjir mendadak (*flash flood*) atau luapan sungai akibat curah hujan tinggi. Fleksibilitas ini menjadi kunci agar kebijakan tidak kaku dan tetap efektif di lapangan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan telah berlangsung secara sistematis, adaptif, dan terkoordinasi. Urutan pelaksanaan kebijakan yang jelas, penyesuaian instrumen secara berkelanjutan, identifikasi titik kritis, integrasi lintas sektor, konsistensi dan koherensi instrumen, kongruensi tindakan, hubungan vertikal, struktur koordinasi yang kuat, serta partisipasi masyarakat menjadikan proses penanggulangan bencana lebih responsif, akuntabel, dan efektif. Melalui mekanisme ini, seluruh tahapan penanggulangan banjir dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dapat dilakukan secara harmonis dan berkeadilan, meminimalkan risiko, serta memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat terdampak di Kabupaten Aceh Selatan.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait, baik dari sisi kelembagaan, teknis, koordinasi lintas sektor, maupun partisipasi masyarakat. Analisis temuan mengacu pada dimensi temporal, *variation sectoral*, *policy mix coherence*, dan *multilevel governance*, yang memungkinkan pemahaman holistik terhadap kompleksitas pelaksanaan kebijakan di lapangan (Sadek dkk., 2025).

Pertama, dari dimensi temporal, penelitian menemukan bahwa program mitigasi seperti normalisasi sungai, pembangunan tanggul, dan pengelolaan saluran drainase sering bersifat situasional, tergantung tingkat kerawanan banjir dan urgensi penanganan. Meskipun beberapa kegiatan dilakukan secara berulang, keberlanjutan program masih bergantung pada ketersediaan anggaran tahunan dan prioritas politis. Temuan ini mengindikasikan perlunya perencanaan yang lebih sistematis dan berkesinambungan untuk memastikan mitigasi dilakukan secara proaktif, bukan hanya reaktif. Hal ini sejalan dengan literatur tentang manajemen bencana yang menekankan pentingnya *continuous risk assessment* untuk mengurangi kerugian akibat bencana berulang.

Kedua, dimensi *variation sectoral* menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan banjir sangat bergantung pada sinergi antarinstansi. BPBD sebagai koordinator utama bekerja sama dengan Dinas PUPR, DLHK, dan Dinas Sosial untuk mengintegrasikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial. Namun, penelitian mengidentifikasi adanya tumpang tindih kewenangan, terutama pada tahap tanggap darurat dan distribusi bantuan. Temuan ini menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor perlu diperkuat melalui mekanisme formal, pembagian tugas yang jelas, serta komunikasi yang cepat dan akurat di lapangan.

Ketiga, dari aspek *policy mix coherence*, penelitian menunjukkan bahwa regulasi, program, anggaran, SOP, dan kegiatan masyarakat belum selalu selaras. Misalnya, regulasi yang mengamanatkan pencegahan banjir tidak selalu diikuti dengan program teknis yang memadai, keterbatasan anggaran menghambat implementasi, dan SOP tidak diterapkan konsisten. Hal ini mencerminkan bahwa *policy instruments* perlu dikaji secara terintegrasi agar setiap elemen kebijakan mendukung pencapaian tujuan yang sama, yaitu perlindungan masyarakat dan pengurangan risiko bencana (Samsurijan dkk., 2024).

Keempat, dimensi *multilevel governance* mengungkapkan pentingnya hubungan koordinatif antarlevel pemerintahan. BPBD Kabupaten Aceh Selatan membutuhkan dukungan Pemerintah Aceh dan BNPB untuk menghadapi banjir berskala besar. Dalam praktiknya, penerbitan surat pernyataan ketidaksanggupan (*statement of incapacity*) menjadi mekanisme administratif untuk mempercepat intervensi vertikal. Selain itu, kecamatan dan gampong berperan sebagai ujung tombak implementasi, terutama dalam mobilisasi warga, pendataan korban, dan evakuasi awal. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan vertikal dan koordinasi lokal merupakan kunci efektivitas implementasi kebijakan (Rowa & Aser, 2019)

Selain faktor kelembagaan dan koordinasi, penelitian menekankan peran partisipasi masyarakat sebagai pendukung utama. Keterlibatan masyarakat dalam gotong royong, pelaporan dini, dan pengelolaan posko pengungsian mempercepat respon lapangan dan meningkatkan keberhasilan mitigasi. Namun, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih menjadi penghambat signifikan. Temuan ini menekankan pentingnya pendekatan *community-based disaster management* untuk memperkuat kesiapsiagaan dan solidaritas sosial.

Secara keseluruhan, diskusi temuan utama menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Aceh Selatan dipengaruhi oleh integrasi antara perencanaan, sumber daya, koordinasi lintas sektor, dukungan vertikal, dan partisipasi masyarakat. Kebijakan formal tanpa koordinasi yang efektif dan keterlibatan warga tidak dapat mencapai tujuan mitigasi secara optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan memetakan faktor pendukung dan penghambat secara sistematis, yang dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan. Temuan ini juga menambah literatur tentang pengelolaan bencana di daerah rawan banjir, menekankan pentingnya sinergi kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana (De Witte dkk., 2025).

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama mengenai implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan, penelitian ini juga faktor pendukung, penghambat serta upaya Pemerintah Daerah Aceh Selatan dalam mengatasi hambatan dan meningkatkan dukungan dalam menanggulangi banjir di Kabupaten Aceh Selatan.

1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

1) Kelembagaan dan Landasan Hukum

Keberadaan BPBD Kabupaten Aceh Selatan sebagai lembaga khusus menangani kebencanaan merupakan faktor pendukung utama. BPBD beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan regulasi daerah yang mengatur struktur organisasi, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja. Kepala Pelaksana BPBD menjelaskan bahwa *"Secara kelembagaan, BPBD Aceh Selatan memiliki dukungan regulasi yang jelas. Tugas kami diatur dalam peraturan bupati dan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga kami memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan penanggulangan bencana, termasuk banjir. Dengan adanya landasan hukum ini, koordinasi dengan OPD lain dan permintaan dukungan anggaran menjadi lebih terarah."* Kejelasan struktur dan

kewenangan ini memperkuat legitimasi BPBD sebagai koordinator utama dan mempermudah koordinasi lintas sektor.

2) Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor

Sinergi lintas sektor antara BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, aparat kecamatan dan gampong, TNI/Polri, serta organisasi kemasyarakatan menjadi faktor pendukung penting. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD menegaskan, *"Dalam praktik di lapangan, kami tidak bisa bekerja sendiri. Untuk normalisasi sungai, perbaikan saluran, dan infrastruktur lain, kami berkoordinasi dengan Dinas PUPR. Untuk pengelolaan posko pengungsian dan bantuan logistik, kami bekerja sama dengan Dinas Sosial. Kemudian, camat dan keuchik sangat berperan dalam mobilisasi masyarakat dan evakuasi ketika banjir terjadi."* Kolaborasi ini memungkinkan penanganan banjir lebih terpadu dan efisien, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mempercepat respon terhadap masyarakat terdampak.

3) Partisipasi dan Solidaritas Masyarakat

Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan gotong royong, pelaporan dini kenaikan debit air, evakuasi, dan pengelolaan pos pengungsian turut memperkuat implementasi kebijakan. Sekda Aceh Selatan menyatakan, *"Masyarakat di beberapa gampong rawan banjir sudah terbiasa bekerja sama dengan BPBD, misalnya saat musim hujan mereka aktif melaporkan kondisi sungai, membantu membersihkan parit, dan ikut dalam sosialisasi kebencanaan. Pada saat banjir, masyarakat juga saling membantu dalam evakuasi, terutama terhadap kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak."* Partisipasi masyarakat menjadi elemen sosial penting yang meningkatkan efektivitas mitigasi dan tanggap darurat.

4) Ketersediaan Kajian dan Informasi Kebencanaan

Kajian teknis dan informasi berbasis data membantu perencanaan dan pelaksanaan program. Studi kelayakan di wilayah Trumon memberikan gambaran risiko, penyebab banjir, dan alternatif penanganan. Kepala Seksi Pencegahan BPBD menyebutkan, *"Kajian-kajian yang disusun baik oleh provinsi maupun lembaga lain sangat membantu kami. Dari sana kami bisa melihat peta risiko, wilayah mana yang paling rawan, serta rekomendasi teknis yang bisa diintegrasikan ke dalam program kerja BPBD. Jadi, perencanaan tidak hanya berdasarkan pengalaman, tetapi juga pada data dan analisis yang lebih ilmiah."*

5) Program Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan (*Capacity Building*)

Pelatihan teknis, simulasi tanggap darurat, sosialisasi kebencanaan, dan pendidikan masyarakat menjadi faktor pendukung lain. Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan, *"Setiap tahun kami berupaya mengusulkan kegiatan pelatihan dan sosialisasi, baik untuk internal BPBD maupun masyarakat di gampong-gampong rawan banjir. Meskipun anggaran terbatas, kami mencoba menjalin kerja sama dengan provinsi dan lembaga lain supaya pelatihan tetap bisa berjalan. Harapannya, kapasitas personel dan masyarakat semakin meningkat, sehingga respon terhadap banjir bisa lebih cepat dan tepat."* Program ini meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap bencana.

Berdasarkan temuan, faktor pendukung yang paling signifikan adalah kelembagaan kuat dengan landasan hukum jelas, koordinasi lintas sektor efektif, serta partisipasi masyarakat aktif. Sinergi antara BPBD, OPD teknis, aparat keamanan, dan pemerintah gampong mempercepat respons dan meningkatkan efektivitas penanganan banjir.

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

1) Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kepala Pelaksana BPBD menyatakan, *"Kendala utama yang kami hadapi adalah keterbatasan anggaran. Banyak program yang sebenarnya sudah direncanakan, seperti normalisasi sungai, pembangunan drainase, dan penguatan kapasitas masyarakat, tetapi belum semuanya bisa direalisasikan karena keterbatasan dana. Kami harus melakukan skala prioritas dalam setiap kegiatan."* Keterbatasan ini memengaruhi efektivitas pencegahan dan mitigasi jangka panjang.

2) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Alat evakuasi, kendaraan operasional, dan fasilitas pendukung lainnya masih kurang memadai. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD menyampaikan, *"Dalam kondisi darurat, kami sering menghadapi kendala keterbatasan peralatan, seperti perahu karet, alat komunikasi, dan kendaraan operasional. Apalagi jika banjir terjadi di beberapa titik sekaligus, tentu ini sangat mempengaruhi kecepatan respon kami di lapangan."*

3) Koordinasi yang Belum Optimal

Meskipun koordinasi lintas sektor telah dibangun, sinkronisasi program dan komunikasi antarinstansi masih belum sempurna. Perbedaan prioritas, birokrasi berjenjang, dan keterlambatan pertukaran informasi menghambat respons cepat. Seorang staf BPBD menyatakan, *"Koordinasi memang sudah ada, tetapi dalam beberapa situasi masih belum berjalan optimal. Kadang terjadi keterlambatan informasi atau perbedaan persepsi antarinstansi, sehingga penanganan di lapangan menjadi kurang maksimal."*

4) Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan menjadi faktor sosial penghambat. Kebiasaan membuang sampah ke sungai dan drainase memperparah risiko banjir. Seorang tokoh masyarakat menegaskan, *"Masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan ke sungai."*

5) Keterbatasan Data dan Pembaruan Informasi

Meskipun tersedia kajian kebencanaan, data belum diperbarui secara berkala atau terintegrasi antarinstansi, sehingga perencanaan kurang responsif terhadap kondisi terbaru. Kepala Seksi Pencegahan BPBD menyebutkan, *"Kami memang memiliki beberapa data dan kajian, tetapi tantangannya adalah pembaruan data secara berkala dan integrasi antarinstansi. Kadang data yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan."*

6) Keterbatasan Kapasitas SDM

Kompetensi sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat, masih menjadi kendala. Tidak semua personel memiliki pelatihan memadai, terutama di tingkat gampong. Kepala Pelaksana BPBD menyatakan, *"Kami masih membutuhkan peningkatan kapasitas SDM, terutama di tingkat bawah. Pelatihan memang sudah dilakukan, tetapi belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah rawan banjir."* Keterbatasan kapasitas teknis berdampak pada efektivitas penanganan bencana.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Aceh Selatan masih menghadapi kendala signifikan, terutama terkait sumber daya, koordinasi, kesadaran masyarakat, serta integrasi data. Keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan kapasitas SDM memengaruhi kemampuan BPBD dan instansi terkait dalam menjalankan program secara optimal. Selain itu, kendala koordinasi lintas sektor, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan,

serta data yang tidak selalu terkini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih perlu diperkuat dari sisi kelembagaan, sumber daya, serta kesadaran masyarakat agar efektivitas penanggulangan bencana banjir meningkat secara berkelanjutan.

Sedangkan, untuk upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam mengatasi hambatan sekaligus memperkuat faktor pendukung penanggulangan banjir dilaksanakan melalui berbagai langkah struktural, teknis, dan sosial, yang selaras dengan kebijakan nasional serta menyesuaikan kondisi lokal di lapangan. Strategi tersebut mencakup penguatan perencanaan dan landasan kebijakan, pembangunan infrastruktur, koordinasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas SDM dan pengelolaan informasi.

1. Penguatan Perencanaan dan Landasan Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memperkuat perencanaan penanggulangan banjir melalui penyusunan dokumen teknis, termasuk *master plan* pengendalian banjir yang disusun bersama Pemerintah Aceh dan perguruan tinggi. Forum diskusi terarah (*Focused Group Discussion/FGD*) juga digunakan untuk membahas pengendalian banjir pada wilayah sungai kewenangan provinsi yang melintasi Aceh Selatan. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi hambatan keterbatasan data dan perencanaan yang sebelumnya belum sepenuhnya sistematis, sekaligus memperkuat dukungan dengan rumusan program yang lebih terarah dan berbasis kajian ilmiah.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Selatan menyampaikan, *"Selama beberapa tahun terakhir, kami berupaya menyusun rencana induk pengendalian banjir dengan melibatkan dinas pengairan provinsi dan pihak universitas. Dengan adanya master plan, kami memiliki panduan yang lebih jelas tentang titik-titik kritis banjir, prioritas penanganan, serta kebutuhan anggaran jangka pendek dan jangka panjang. Ini penting untuk mengurangi kebijakan yang bersifat reaktif dan menggantinya dengan perencanaan yang lebih terstruktur."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penguatan perencanaan teknis menjadi instrumen penting untuk mengatasi hambatan keterbatasan data sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan penanggulangan banjir.

2. Infrastruktur dan Normalisasi Sungai

Dalam aspek teknis, pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui BNPB dalam pembangunan dan penguatan infrastruktur pengendali banjir, seperti tanggul pengaman tebing sungai di kawasan rawan luapan, misalnya di Krueng Kluet. Selain pembangunan tanggul permanen, pemerintah juga melakukan penanganan sementara berupa pemasangan *batu gajah* serta pengerahan alat berat untuk pengerukan drainase dan saluran tersumbat, sehingga genangan air dapat cepat surut.

Wakil Bupati Aceh Selatan menyatakan, *"Kami terus mengupayakan pembangunan tanggul dan penguatan tebing sungai bekerja sama dengan BNPB. Di beberapa titik, kami juga memasang batu gajah dan melakukan normalisasi saluran sebagai langkah cepat agar banjir tidak semakin meluas. Upaya teknis ini memang membutuhkan anggaran besar, tetapi menjadi prioritas karena langsung menyentuh akar persoalan di lapangan."*

Selain itu, pascabencana, pemerintah daerah bersama Polres Aceh Selatan dan BPBD mempercepat normalisasi sungai dan saluran air, serta membersihkan lumpur dan sampah di parit-parit permukiman untuk mencegah banjir susulan. Langkah ini sekaligus menjadi respons terhadap hambatan keterbatasan sarana prasarana dan kebutuhan penanganan cepat di lokasi terdampak.

3. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Dukungan Suprastruktur

Untuk mengatasi hambatan koordinasi yang belum optimal, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memperkuat mekanisme kerja sama lintas sektor dengan melibatkan BPBD, dinas teknis seperti PUPR dan Dinas Sosial, aparat TNI/Polri, serta pemerintah provinsi dan pusat. Saat terjadi banjir berskala besar, pemerintah kabupaten menerbitkan surat pernyataan ketidaksanggupan

(*statement of incapacity*) sebagai dasar permohonan dukungan dan intervensi dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Kepala Pelaksana BPBD Aceh Selatan menyampaikan, *"Ketika banjir berskala besar terjadi dan kemampuan kami terbatas, pemerintah kabupaten menerbitkan surat pernyataan ketidaksanggupan. Ini bukan berarti kami menyerah, tetapi langkah administratif agar bantuan dari provinsi dan pusat bisa segera turun, baik berupa personel, logistik, maupun pendanaan."* Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengatasi hambatan kapasitas fiskal dan operasional dengan memperluas dukungan vertikal, sekaligus memperkuat koordinasi horizontal antarinstansi terkait.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Partisipasi

Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan dukungan sosial melalui penguatan partisipasi masyarakat, terutama di wilayah rawan banjir. Hal ini dilakukan dengan mendorong kegiatan gotong royong pembersihan saluran air, sosialisasi kebencanaan, pelibatan komunitas lokal dan pemuda dalam menjaga daerah aliran sungai (*DAS*) serta kawasan hulu, termasuk program penanaman pohon dan kampanye menjaga hutan untuk mitigasi banjir dan longsor.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan menyatakan, *"Kami tidak hanya fokus pada respon ketika banjir terjadi, tetapi juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan. Melalui sosialisasi di gampong-gampong dan kerja sama dengan komunitas lokal, kami mendorong kegiatan bersih-bersih sungai, penanaman pohon di daerah hulu, dan edukasi tentang bahaya membuang sampah ke saluran air. Partisipasi masyarakat ini sangat membantu mengurangi risiko, terutama di musim hujan."*

Langkah ini secara langsung mengatasi hambatan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, sekaligus memperkuat faktor pendukung berupa solidaritas sosial dan kearifan lokal dalam menghadapi banjir.

5. Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengelolaan Informasi

Untuk menjawab hambatan keterbatasan kapasitas SDM dan kualitas data kebencanaan, pemerintah daerah melalui BPBD, dukungan pemerintah provinsi, dan lembaga terkait, mendorong pelatihan, simulasi, dan peningkatan kompetensi aparatur serta relawan di wilayah rawan banjir. Pelatihan mencakup aspek pencegahan, tanggap darurat, hingga pemanfaatan data dan teknologi sederhana untuk pemantauan risiko.

Kepala Pelaksana BPBD Aceh Selatan menjelaskan, *"Setiap tahun kami berupaya mengusulkan program pelatihan dan simulasi, baik untuk internal BPBD maupun aparatur kecamatan dan gampong. Kami juga memanfaatkan kajian risiko banjir yang disusun oleh provinsi dan lembaga lain sebagai bahan penyusunan rencana kerja. Dengan peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan data yang lebih baik, kami berharap respon terhadap banjir menjadi lebih cepat, terarah, dan berbasis bukti."*

Langkah ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM dan pengelolaan informasi tidak hanya mengatasi hambatan internal, tetapi juga memperkuat dukungan jangka panjang dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir.

Berdasarkan wawancara dan observasi, upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk mengatasi hambatan dan memperkuat faktor pendukung terlihat melalui langkah-langkah yang semakin terencana, terpadu, dan berbasis bukti. Penyusunan *master plan* pengendalian banjir bersama Pemerintah Aceh dan perguruan tinggi, didukung kajian teknis kawasan rawan, menjadi dasar perencanaan yang terstruktur. Pembangunan dan penguatan infrastruktur pengendali banjir berupa tanggul, pemasangan *batu gajah*, normalisasi sungai dan saluran air memperlihatkan komitmen untuk mengatasi keterbatasan sarana prasarana (Boufounou dkk., 2024).

Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan, termasuk mekanisme administrasi untuk permohonan dukungan vertikal, memberikan respons yang lebih cepat dan jelas. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan gotong royong, sosialisasi, kampanye lingkungan, penanaman pohon, serta peningkatan kapasitas aparatur dan relawan memperkuat dukungan sosial dan kesiapsiagaan. Secara keseluruhan, temuan lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga memperkuat fondasi kelembagaan, teknis, dan sosial secara simultan untuk mendukung implementasi kebijakan penanggulangan banjir yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Selatan.

Selain temuan-temuan yang sudah di jabarkan, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah temuan menarik lainnya yang memberikan wawasan tambahan terkait dinamika pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Temuan-temuan ini berfokus pada inovasi operasional, respons masyarakat, serta adaptasi strategi pemerintah daerah terhadap kondisi lapangan yang berubah-ubah (Rosa, 2019).

Pertama, penelitian menunjukkan adanya inovasi operasional dalam mekanisme tanggap darurat yang dilakukan oleh BPBD Aceh Selatan. Misalnya, penggunaan sistem pemantauan debit air berbasis sederhana dan koordinasi real-time dengan aparat kecamatan dan gampong menunjukkan kemampuan adaptasi daerah terhadap keterbatasan teknologi dan sumber daya. Sistem ini memungkinkan BPBD untuk mendapatkan informasi lebih cepat mengenai potensi banjir dan mengambil keputusan evakuasi secara lebih tepat waktu. Pendekatan ini menekankan pentingnya adaptasi lokal (*local adaptation*) dalam manajemen bencana, di mana pemerintah daerah menyesuaikan prosedur standar (*standard operating procedure*) dengan kondisi lapangan untuk meningkatkan efektivitas penanggulanga (Kamchatov dkk., 2021).

Kedua, temuan menarik terkait respons masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi warga tidak hanya terbatas pada kegiatan fisik seperti gotong royong dan evakuasi, tetapi juga meliputi peran sebagai informan yang melaporkan kondisi sungai, tanggul, dan saluran drainase. Keterlibatan ini meningkatkan akurasi data lapangan dan mempercepat proses mitigasi. Fenomena ini sejalan dengan konsep *community-based disaster management*, yang menekankan peran aktif masyarakat sebagai pelengkap kapasitas pemerintah dalam penanggulangan bencana. Dalam beberapa kasus, warga yang memiliki pengalaman menghadapi banjir sebelumnya menjadi agen penting dalam menyosialisasikan langkah-langkah kesiapsiagaan kepada keluarga dan tetangga, memperkuat jaringan solidaritas sosial dan kearifan lokal (Adie et al., 2024).

Ketiga, penelitian menemukan bahwa integrasi antara kebijakan formal dan praktik lapangan tidak selalu linear. Dalam beberapa situasi, BPBD Aceh Selatan melakukan penyesuaian ad-hoc terhadap prosedur operasional, misalnya menunda program normalisasi sungai atau menambah titik evakuasi berdasarkan kondisi cuaca dan curah hujan terkini. Adaptasi ini menyoroti fleksibilitas pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian, sekaligus menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bukan sekadar mekanis, tetapi juga membutuhkan pertimbangan kontekstual yang responsif (Rahmadanita dkk., 2018).

Keempat, penggunaan instrumen administrasi, seperti penerbitan surat pernyataan ketidaksanggupan (*statement of incapacity*) ketika kapasitas fiskal dan operasional terbatas, menjadi temuan menarik lainnya. Instrumen ini memungkinkan pemerintah kabupaten mendapatkan dukungan vertikal dari pemerintah provinsi atau pusat secara lebih cepat, baik berupa pendanaan, personel, maupun logistik. Strategi ini menunjukkan inovasi prosedural yang mendukung implementasi kebijakan meskipun menghadapi keterbatasan internal.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa program peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat secara simultan memberikan efek sinergis yang positif. Pelatihan aparatur BPBD, simulasi tanggap darurat, dan sosialisasi kebencanaan di gampong-gampong rawan banjir meningkatkan kesadaran masyarakat, mempercepat proses evakuasi, dan menambah efektivitas

tanggap darurat. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi penguatan kapasitas internal dan partisipasi masyarakat memperkuat ketahanan lokal terhadap bencana (Santoso dkk., 2019).

Secara keseluruhan, temuan menarik ini menekankan pentingnya inovasi lokal, adaptasi kontekstual, partisipasi aktif masyarakat, dan penggunaan instrumen administratif yang fleksibel dalam mendukung implementasi kebijakan penanggulangan banjir. Temuan ini memperkaya pemahaman mengenai dinamika operasional di lapangan, menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh perencanaan formal dan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah untuk berinovasi, beradaptasi, dan memanfaatkan potensi masyarakat secara optimal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh yang dianalisis menggunakan kerangka teori Capano dan Howlett (2020) dengan empat dimensi utama, yaitu urutan pelaksanaan kebijakan (temporal), variasi sektoral (*variation sectoral*), koherensi bauran kebijakan (*policy mix coherence*), dan tata kelola multilevel (*multilevel governanc*e), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Aceh Selatan secara umum telah menunjukkan pola pelaksanaan yang cukup sistematis dan terarah. Hal ini terlihat dari adanya tahapan kebijakan yang berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga pelaporan secara berkala oleh perangkat daerah terkait, khususnya BPBD. Keberadaan SOP, pembagian tugas, serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting yang membantu menjaga keteraturan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Meskipun demikian, efektivitas implementasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual di daerah, terutama karakteristik wilayah yang rawan banjir, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta dinamika koordinasi antarinstansi yang memerlukan penguatan berkelanjutan. Dalam proses implementasinya, kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Aceh Selatan masih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup signifikan. Hambatan tersebut terutama berkaitan dengan keterbatasan anggaran untuk program pencegahan dan mitigasi jangka panjang, belum memadainya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, serta koordinasi antarlembaga yang belum sepenuhnya optimal akibat perbedaan prioritas dan keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga lingkungan, seperti kebiasaan membuang sampah ke saluran air dan pemanfaatan sempadan sungai sebagai kawasan permukiman, juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pengendalian banjir. Dengan demikian, hambatan implementasi tidak hanya bersumber dari aspek kelembagaan, tetapi juga dari faktor sosial dan perilaku masyarakat yang turut memengaruhi keberhasilan kebijakan.

Menanggapi berbagai hambatan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan sejumlah upaya perbaikan yang bersifat struktural, teknis, dan sosial. Upaya ini mencakup penyusunan perencanaan pengendalian banjir yang lebih komprehensif, peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, dan pelibatan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Di samping itu, peningkatan kapasitas aparatur dan relawan juga terus diupayakan agar respon terhadap banjir dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi. Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga berupaya membangun sistem penanggulangan banjir yang lebih berkelanjutan melalui pendekatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh

Selatan. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan pengumpulan data belum dapat menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir secara menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas program mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir dengan melibatkan lebih banyak lokasi penelitian serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih disampaikan kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa henti. Ucapan penghargaan juga ditujukan kepada dosen pembimbing, Dr. Ahmad Averus, S.STP., M.Si, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penelitian. Tidak lupa, penulis menghaturkan terima kasih kepada rekan-rekan, instansi terkait, dan seluruh pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adie, B. U., Tate, M., & Valentine, E. (2024). Digital leadership in the public sector: A scoping review and outlook. *International Review of Public Administration, 29*(1), 42–58. https://doi.org/10.1080/12294659.2024.2323847

Aisyiah, N., & Amin,N.I (2025). *Implementasi kebijakan rehabilitasi pasca bencana banjir di Kota Langsa Provinsi Aceh.* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. IPDN Repository. https://eprints.ipdn.ac.id/22849/

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). *Buku data bencana Indonesia tahun 2023*. PusdatinkomBNPB.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan. (2025). *Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020–2025*. BPBD Kabupaten Aceh Selatan.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah kejadian bencana alam menurut provinsi, 2023*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/TUZaMGVteFVjSEJ4T1RCMlIyRjRTazVvVDJocVFUMDkjMw%3D%3D/jumlah-kejadian-bencana-alam-menurut-provinsi.html?year=2023

Boufounou, P., Eriotis, N., Kounadeas, T., Argyropoulos, P., & Poulopoulos, J. (2024). Enhancing internal control mechanisms in local government organizations: A crucial step towards mitigating corruption and ensuring economic development. *Economies, 12*(4), 78. https://doi.org/10.3390/economies12040078

Capano, G., & Howlett, M. (2020). The knowns and unknowns of policy instrument analysis: Policy tools and the current research agenda on policy mixes. *SAGE Open, 10*(1), 1–13. https://doi.org/10.1177/2158244019900568

Chandler, A. D. (1962). *Strategy and structure: Chapters in the history of the American industrial enterprise*. MIT Press.

Coombs, W. T. (2007). *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding* (2nd ed.). SAGE Publications.

Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural development participation: Concepts and measures for project design, implementation and evaluation*. Cornell University, Center for International Studies.

De Witte, K., De La Torre, E. M., Sicilia, G., & Agasisti, T. (2025). The importance of efficiency analysis for improving public services: Editorial to the special issue on “Efficiency and productivity analysis of public services in practice.” *International Transactions in Operational Research, 32*(5), 2443–2452. https://doi.org/10.1111/itor.70009

Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Fritz Institute. (2005). *Humanitarian logistics: A source of effective response to humanitarian crises*. Fritz Institute.

Furqan, H., & Harahap (2024). *Evaluasi program penyaluran bantuan logistik korban bencana banjir di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. IPDN Repository. https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=30654

Herald, W., Rahmah, M., & Hamdi, M. (2025). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana: Studi penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 18*(1), 61–78. https://doi.org/10.33701/jppdp.v18i1.4543

Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public policy: A new introduction* (2nd ed.). Red Globe Press.

Kamchatov, K. V., Timoshenko, A. A., Kamchatova, E. Y., & Buzu, O. V. (2021). Effective management of seized and confiscated assets as a condition for providing victims with access to justice and fairness of procedures used in criminal proceedings: International and Russian experience. *Atlantis Press* 189–196. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210225.029

LIPI–UNESCO/ISDR. (2006). *Kajian kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana gempa bumi dan tsunami*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), UNESCO, dan International Strategy for Disaster Reduction (ISDR).

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. (2019)wija. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi Keempat. Thousand Oaks, California: SAGE Publications

Mukhtari, W., & Fitri, A. (2025). Konsepsi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. *Siwah: Multidisciplinary Scientific Journal, 1*(2), 150–160. https://journal.independentresearchcenter.com/smsj/article/download/24/99

Pahwa, M., Cavanagh, A., & Vanstone, M. (2023). Key informants in applied qualitative health research. *Qualitative Health Research, 33*(14), 1251–1261. https://doi.org/10.1177/10497323231198796

Pratiwi, F. S. (2024, March 14). *Data jumlah kejadian banjir di Indonesia (2013–2023)*. DataIndonesia.id. https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kejadian-banjir-di-indonesia-20132023

Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2018). Implementasi kebijakan *smart government* dalam rangka mewujudkan *smart city* di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 44*(2), 81–106. https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i2.279

Rahma, D., & Yulianti, F. (2020). Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di Gampong Cot Bayu Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Pendidikan Geosfer, 5*(2), 22–31. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3337401

Rosa, A. T. R. (2019). Effectiveness of the role of information systems and policy systems in educational management to improve the quality of public service in Cileunyi District, Bandung Regency. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 45*(1), 99–108. https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i1.325

Rowa, H., & Aser, F. (2019). Efektivitas implementasi kebijakan penataan lembaga kemasyarakatan rukun tetangga dan rukun warga di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 9*(1). http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1153/

Sadek, M. A. A., Rahmah, M., & Hamdi, M. (2025). Implementation of policy to reduce stunting in Majene Regency, West Sulawesi Province. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 10*(1), 49–70. https://doi.org/10.33701/j-3p.v10i1.4618

Samsurijan, M. S., Ebekozien, A., Nor Azazi, N. A., Shaed, M. M., & Radin Badaruddin, R. F. (2024). Artificial intelligence in urban services in Malaysia: A review. *PSU Research Review, 8*(2), 321–340. https://doi.org/10.1108/PRR-07-2021-0034

Santoso, E. B., Moenek, R., & Nurpahdi, M. (2019). Evaluasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 45*(1), 17–32. https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i1.351

Saputra, R. H. (2025, November 29). *Lintasan Aceh-Sumut lumpuh akibat luapan sungai di Aceh Selatan*. ANTARA Aceh. https://aceh.antaranews.com/berita/396709/lintasan-aceh-sumut-lumpuh-akibat-luapan-sungai-di-aceh-selatan

Sari, R. V., Ketaren, O., Tarigan, F., Nababan, D., & Sitorus, M. E. (2021). Tingkat kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir pada SDN Pinding Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2020. *Jurnal Semesta Sehat (J-Mestahat), 1*(2), 98–107. https://doi.org/10.58185/j-mestahat.v1i2.81

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (1985). *Systematic evaluation: A self-instructional guide to theory and practice*. Kluwer-Nijhoff Publishing.

Universitas Nusa Cendana (UNDANA). (2019). *Konsep rehabilitasi pasca bencana dan pemulihan masyarakat terdampak bencana*. Universitas Nusa Cendana.

Surry, K. (2021, May 19). *9.532 jiwa terdampak banjir di Aceh Selatan*. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/2164226/9532-jiwa-terdampak-banjir-di-aceh-selatan

Wetania, S., & Jalaluddin (2023). *Strategi Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan logistik bencana banjir di Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. IPDN Repository. https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=31871

Wijayanto, R. S., Marlina, N., & Supratiwi (2024). Evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022–2023. *Journal of Politic and Government Studies,13*(4), 343–363. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/47309